

OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA NASIONAL DI KALIMANTAN TIMUR GUNA MENGHADAPI ANCAMAN MILITER DI ALKI II

Slamet Hayat Riptanto¹, Syaiful Hasan²

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia
hayulin1@gmail.com¹, syaifulhasan53@gmail.com²

Submitted: 04th July 2023/ **Edited:** 26th September 2023/ **Issued:** 01st October 2023
Cited on: Riptanto, S. H., & Hasan, S. (2023). OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA NASIONAL DI KALIMANTAN TIMUR GUNA MENGHADAPI ANCAMAN MILITER DI ALKI II. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(4), 965-974.

ABSTRACT

In era of the industrial revolution 4.0 which is marked by a world that is increasingly borderless and full of uncertainty, these challenges are becoming increasingly complex. potential threats in the Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI II), particularly in the East Kalimantan region. Developments in the global, regional and national strategic environment have had a significant impact on the conditions and situation at ALKI II. One of the national strategic developments is the establishment of East Kalimantan as the new National Capital (IKN), which makes ALKI II an area vulnerable to military threats. Optimizing the empowerment of the potential of national resources in this region is very important in maintaining stability, sovereignty and state security in the maritime area, especially in ALKI II. To achieve this, steps are needed to be implemented by the central and regional governments to deal with maritime challenges more effectively and ensure the integrity and security of the maritime area. Changes in Indonesia's Center of Gravity (CoG), which was previously based in Jakarta, moved to the East Kalimantan region. In addition, the IKN location is at the ALKI II crossing which is an international waterway passed by military and civilian ships, and is close to the Flight Information Region (FIR) of a neighboring country and within the cruising radius of a neighboring country. Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) from China on the northern side of Indonesia. Therefore, it is necessary to implement a solid defense architecture in the East Kalimantan IKN and optimize the empowerment of the potential of National Resources in order to deal with military threats and support national defense at sea.

Keywords: Indonesian Archipelagic Sea Lanes II, Military Threats, Empowerment of National Resources

PENDAHULUAN

Aspek vital dalam menjaga kedaulatan, integritas, dan kestabilan suatu negara adalah pertahanan dan keamanan Negara (Ali, et al., 2021). Di tengah kompleksitas ancaman yang terus berkembang baik dari dalam maupun luar, pertahanan dan keamanan negara melibatkan serangkaian upaya yang luas, komprehensif, dan terpadu. Dengan menjalankan strategi pertahanan dan keamanan yang holistik, berkelanjutan,

dan adaptif, negara dapat melindungi kepentingan nasional, menjaga stabilitas sosial, serta melindungi kesejahteraan dan kehidupan rakyatnya dari berbagai ancaman yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah Republik Indonesia dan segenap komponen bangsa di era revolusi industri 4.0 dimana dunia semakin tidak terbatas (*borderless world*) serta penuh ketidakpastian (*in the age of uncertainty*) ini untuk mentransformasikan pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna menghadapi ancaman aspek militer di ALKI II tersebut, maka diperlukan optimalisasi pemberdayaan potensi sumber daya nasional di Kalimantan Timur.

Salah satu potensi ancaman negara Indonesia terletak di ALKI II. Sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional, ALKI II memiliki nilai strategis. ALKI II mencakup Selat Lombok, Selat Makassar, dan Laut Sulawesi (Harris, et al., 2021). Perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional turut mempengaruhi kondisi dan situasi di ALKI II. Perkembangan lingkungan strategis nasional yang ada adalah penetapan daerah Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Hal ini menjadikan ALKI II sebagai kawasan yang memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi salah satunya ancaman militer berupa ancaman bawah air, diikuti oleh ancaman atas air, ancaman udara dan ancaman peperangan elektronika. Adapun aktor ancaman tertinggi yang memungkinkan terjadi di wilayah ALKI II ini adalah dari negara Tiongkok, kemudian AS diikuti Australia, Malaysia dan Filipina.

Secara Geografis, wilayah provinsi Kalimantan Timur berbatasan dengan darat dan laut. Panjang garis pantai provinsi Kalimantan Timur menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sepanjang 3.893,15 km. Optimalisasi pemberdayaan potensi sumber daya nasional sangat penting untuk menjaga stabilitas, kedaulatan, dan keamanan negara di wilayah maritim khususnya di ALKI II (Ardyantara, et al., 2020). Untuk mencapai hal tersebut, beberapa langkah harus dilaksanakan oleh negara dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, agar dapat menghadapi tantangan maritim dengan lebih efektif dan memastikan integritas serta keamanan wilayah maritimnya.

LANDASAN TEORI

Pertahanan maritim

Pertahanan maritim adalah sebuah rangkaian upaya yang komprehensif dan berkelanjutan tentang pengaturan dan pengelolaan ruang wilayah yurisdiksi NKRI sebagai negara kepulauan bercirikan Nusantara, yang mengedepankan aspek kemaritiman, dengan cakupan ruang darat, ruang laut dan ruang udara sebagai suatu kesatuan secara holistik, terhadap seluruh kemampuan dan kekuatan dari sistem pertahanan negara, yang ditata secara tepat dan bijaksana sehingga berdaya guna dan berhasil guna untuk menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI (Yunanda, et al., 2022). Pertahanan maritim adalah segala upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan negara melalui wilayah kelautannya (Pangemanan, 2019).

Strategi

Ahli strategi Arthur F. Lykke Jr. mengembangkan kerangka strategis yaitu Ends, Ways, dan Means. Bagi Lykke, strategi adalah kelanjutan dari proses yang mengidentifikasi tujuan (ends), cara (ways), dan sarana (means) yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu (Kusuma, et al., 2021). Secara matematis, kita dapat menyatakan ini sebagai $\text{Strategy} = \text{Ends} + \text{Ways} + \text{Means}$. Ends adalah tujuan atau hasil yang diinginkan dari strategi yang diberikan. Istilah keadaan akhir sinonim dengan tujuan. Sebuah akhir atau akhir terdiri dari tujuan strategi. Ways adalah tindakan, yang dapat diartikan sebagai metode dan proses yang dijalankan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya akan timbul pertanyaan, bagaimana anda akan mencapai tujuan akhir. Means atau sarana adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan Ways.

Sea Power

Teori Sea Power dicetuskan oleh pertama kali oleh Rear Admiral Alfred Thayer Mahan pada abad 19. Dalam deskripsinya, Mahan menyebutkan pentingnya peran laut sebagai aspek kekuatan sebuah sebuah bangsa, dimana "Barang siapa menguasai lautan, akan menguasai dunia" (Nugroho, et al., 2022). Dalam membangun Sea Power terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, seperti posisi dan kondisi geografi, luas wilayah, jumlah dan karakter penduduk serta yang paling utama adalah karakter pemerintahannya. A.T. Mahan menyatakan, bahwa Kekuatan Laut adalah: "All that tends to make a people great upon the sea or by sea" (Nugroho, et al., 2022). Mahan

menjelaskan bagaimana cara mengerahkan Sea Power untuk menghadapi musuh. Sea Power atau Kekuatan Laut pada dasarnya identik dengan kekuatan maritim atau maritime power. Apabila kekuatan-kekuatan itu diberdayakan, maka akan meningkatkan Kesejahteraan dan Keamanan Negara. Disamping hal tersebut, Rear Admiral A.T Mahan menyatakan bahwa “Keunggulan Angkatan Laut adalah keperluan utama untuk menjadikan negara besar, kuat dan maju” (Zulham, et al., 2021). Dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara maritim hendaknya diimplementasikan ke dalam konsep pertahanan yang berbasis maritim dengan berorientasi kepada 6 elemen sea power yaitu, Letak Geografis, Bentuk Tanah dan Pantainya, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Karakter Penduduk, dan Sifat Pemerintahnya (Zulham, et al., 2021).

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara (Saputra, 2020). Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2019 Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dipersiapkan secara dini untuk menghadapi Ancaman antara lain ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida (Nugroho, et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode atau pendekatan studi kasus (case study). Menurut (Wijaya, 2020), penelitian kualitatif merupakan proses pemahaman yang dilakukan melalui metode mencari tahu dalam mencari makna dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sedangkan Studi kasus menurut (Sutisna, 2021) merupakan strategi penelitian yang di mana di dalamnya peneliti akan menyelidiki secara teliti dan cermat terhadap suatu program, peristiwa, proses, aktifitas, atau sekelompok individu. Penggunaan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dinilai sesuai untuk dilakukan karena penelitian ini berupaya memahami sebuah masalah sosial serta hubungan antar seluruh aktor yang terlibat di dalamnya. Analisis permasalahan

dan pembahasan dilakukan secara mendalam menggunakan berbagai jenis sumber data yang ada.

HASIL PENELITIAN

Sumber daya manusia sebagai komponen cadangan, berhak atas bela negara sekaligus harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta berkeyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi bangsa. Untuk itu perlu dibangun dan dikembangkan secara berlanjut dan terarah agar dalam pengerahan dan penggunaan kesiapannya dapat terwujud. Langkah optimalisasi terkait SDM yang ada di Kalimantan Timur adalah:

1. Pembinaan sumber daya manusia meliputi pembinaan kekuatan dan pembinaan kemampuan. Pembinaan kekuatan yang diharapkan dari sumber daya manusia adalah mampu meningkatkan kemampuan komponen cadangan yang akan digunakan pada saat mendukung operasi di daerah belakang. Pembinaan kekuatan sumber daya manusia yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas kesadaran bela negara dengan jumlah yang proporsional. Melaksanakan pembinaan kemampuan diharapkan sumber daya manusia yang tersedia memiliki kemampuan sesuai dengan profesinya masing-masing dan searah dengan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan komponen cadangan.
2. Pembangunan sumber daya manusia meliputi pembangunan fisik, mental, kecerdasan dan keterampilan. Dalam rangka pembangunan tersebut, materi-materi pelajaran budi pekerti di sekolah sebagai pembentukan dasar kepribadian harus menggambarkan dan mengakar pada budaya bangsa sehingga akan membentuk kepribadian yang mampu diandalkan untuk dapat meningkatkan kemampuan dan kekuatan komponen cadangan.
3. Pengerahan sumber daya manusia dalam pembentukan komponen cadangan perlu ditata dan diatur. Untuk itu perlu penyusunan Undang- Undang yang mengatur tata cara pelaksanaan pengerahan sumber daya manusia, sehingga tidak mengganggu program program yang lainnya. Kegiatan pengerahan sumber daya manusia menyesuaikan dengan kebutuhan di wilayah masing-masing.

Sumber daya alam merupakan potensi wilayah yang dapat dikembangkan menjadi sektor ekonomi (Harahap, et al., 2020). Sektor tersebut meliputi, kelautan, perdagangan,

industri, pertanian, sektor jasa, sektor pariwisata, sektor transportasi dan sektor pertambangan. Ekonomi Pertahanan sebagai salah satu bidang studi ekonomi yang mengkaji berbagai fenomena yang dihadapi di masyarakat berkaitan dengan potensi dan ancaman terhadap kedaulatan ekonomi nasional serta bagaimana strategi pemecahannya untuk mendukung pertahanan negara. Artinya kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi, dilaksanakan dengan berlandaskan kepentingan pertahanan negara.

Perbedaan mendasar antara ekonomi sekuler dengan ekonomi pertahanan adalah ekonomi sekuler kita mengenal tujuannya bersifat profit oriented, tetapi di dalam ekonomi pertahanan di samping profit oriented tetapi juga mengedepankan kepentingan pertahanan negara, agar kesejahteraan dan keamanan bangsa dapat terjaga dalam NKRI (Siswanto & Tegor, 2021). Oleh karena itu keberhasilan dalam penerapan ekonomi pertahanan, harus didukung oleh hukum ekonomi, ekonomi politik dan politik ekonomi serta sosiologi ekonomi dalam penguatan analisisnya yaitu harus dikelola secara mandiri jangan sampai dikelola asing. Dengan demikian, jika ekonomi pertahanan dilaksanakan maka akan memunculkan hipotesis, sebagai berikut: bahwa terwujudnya pertahanan negara akan sangat ditentukan oleh kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kaidah ekonomi dan pertahanan negara. Dengan demikian semakin kuat perekonomian nasional maka “Semakin mampu negara untuk membiayai pembangunan dan pertahanan kuat. Demikian juga semakin kuat perekonomian keluarga maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga negara semakin siap dalam menghadapi ancaman”. Dari pernyataan tersebut, maka langkah optimalisasi SDA yang ada adalah memanfaatkan sebaik-baiknya dengan menerapkan ekonomi pertahanan sebagai dasar untuk pengolahannya.

Sumber Daya Buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan dayagunanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kepentingan pertahanan negara (Zulkarnain & Runturambi, 2022). Sumber Daya Buatan memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pertahanan nasional suatu negara. SDB merujuk pada segala jenis aset dan infrastruktur buatan manusia yang dapat digunakan dalam operasi militer, keamanan nasional, dan pemeliharaan stabilitas dalam negeri. SDB mencakup teknologi tinggi seperti sistem senjata, peralatan komunikasi, sistem intelijen, kendaraan militer, serta infrastruktur strategis seperti jaringan komputer, instalasi listrik, dan sarana

transportasi. Keberadaan SDB yang handal dan canggih menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kemampuan pertahanan nasional, karena mereka memungkinkan negara untuk memantau, melindungi, dan menanggapi ancaman dengan lebih efektif. Dalam era modern yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang cepat, pengembangan dan penggunaan SDB yang inovatif menjadi prioritas penting bagi negara-negara yang ingin menjaga keamanan dan kedaulatan mereka. Langkah optimalisasi yang bisa diterapkan adalah dengan selalu meningkatkan dan mengembangkan SDB yang ada, sehingga ketika dibutuhkan akan selalu siap untuk digunakan dalam pertahanan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 sarana dan prasarana adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional (Prasetia, 2022). Sarana merujuk pada semua fasilitas fisik seperti pangkalan militer, gudang senjata, landasan udara, pelabuhan, dan fasilitas pelatihan militer. Prasarana mencakup infrastruktur yang mendukung operasi pertahanan nasional, seperti jaringan transportasi, jaringan komunikasi, sistem energi, dan sistem pengolahan data. Ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana yang memadai sangat penting dalam memastikan kemampuan pertahanan yang efektif. Mereka memberikan fasilitas untuk pergerakan personel dan peralatan militer, pengawasan wilayah yang luas, serta komunikasi yang cepat dan andal. Dalam upaya menjaga keamanan nasional dan optimalisasi sarana prasarana yang ada, penting bagi negara untuk memiliki sarana dan prasarana yang modern, terjamin keberlanjutannya, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan keamanan dan potensi ancaman yang berkembang, khususnya di ALKI II.

Strategi yang bisa ditetapkan dalam mengatasi potensi ancaman di ALKI II yaitu dengan meningkatkan gelar kekuatan dan kemampuan unsur patroli di Kalimantan Timur dalam sistem pertahanan IKN guna menghadapi berbagai potensi ancaman (Andriani, 2018). Ends / tujuan yang ingin dicapai adalah wilayah perairan di wilayah IKN dalam kondisi kondusif dan bebas dari ancaman. Ways / cara yang digunakan adalah dengan gelar kekuatan unsur khusus dalam pertahanan IKN baik kapal perang, pesawat udara, Marinir dan pangkalan Angkatan Laut yang ada di Kalimantan Timur. Means / Sarana yang bisa digunakan dan dimanfaatkan adalah seluruh sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana infrastruktur yang ada di

Kalimantan Timur untuk mengatasi potensi ancaman yang ada di ALKI II. Upaya-upaya yang bisa dilaksanakan adalah dengan menyiapkan KRI yang memiliki kemampuan sonar, rudal dan senjata modern lainnya. Pesawat udara yang memiliki kemampuan radar dan interoperability dengan sistem pertahanan TNI Angkatan Udara. Menyiapkan pasukan Marinir khusus bagi pertahanan obyek vital IKN. Pangkalan khusus pendukung pertahanan IKN. Sistem rudal pertahanan pantai atau Coastal Defence yang dapat melindungi IKN terhadap ancaman di laut dan di udara.

KESIMPULAN

Pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini sebagai konsekuensi logis konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terpisah oleh luasnya perairan sehingga menjadi celah masuknya berbagai ancaman. Salah satu ancaman militer berupa invasi atau agresi dari negara lain di wilayah Indonesia khususnya di wilayah ALKI II yang merupakan perairan strategis yang memiliki akses langsung dengan lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berbatasan dengan Malaysia, Filipina dan China di sisi Utara. Guna menghadapi ancaman aspek militer di ALKI II tersebut, maka diperlukan optimalisasi pemberdayaan potensi sumber daya nasional di Kalimantan Timur.

Provinsi Kaltim menjadi pusat kekuatan strategis nasional yang dilalui oleh ALKI II. Penunjukan provinsi ini sebagai IKN baru, telah membuka mata dunia tentang ancaman terhadap sebuah keberadaan IKN baik berupa ancaman militer dan non militer. Ancaman militer dan non militer juga kerap dilakukan oleh negara lain terhadap bangsa Indonesia. Penetapan Provinsi Kaltim sebagai IKN tentunya harus diantisipasi oleh pemerintah, dimana hal ini memberikan konsekuensi adanya perubahan Center of Gravity (CoG) Indonesia dari yang sebelumnya berpusat di Jawa khususnya DKI Jakarta, berubah ke wilayah Kaltim sebagai lokasi IKN Nusantara. Lokasi IKN yang berada di perlintasan ALKI II dimana perairan tersebut merupakan rute jalur perairan internasional yang secara konstitusional perlintasan kapal-kapal baik militer maupun sipil dalam rangka lintas damai.

Mencermati konstelasi wilayahnya dalam peta, dimana lokasi IKN yang berada di Provinsi Kaltim hanya berjarak 2.062 Kilometer dari Negara Malaysia, selain itu lokasi IKN di Kaltim juga mendekati Flight Information Region (FIR) negara tetangga (Singapura FIR, Kinabalu FIR dan Manila FIR) serta masuk dalam radius jelajah Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) atau Peluru Kendali Balistik Antarbenua negara China yang berada di sisi Utara Indonesia. Hal tersebut tentunya perlu mitigasi dengan penerapan arsitektur pertahanan yang baik di IKN, serta dengan memperhatikan dan mengoptimalkan pemberdayaan potensi Sumdanas di Provinsi Kalimantan Timur guna menghadapi ancaman militer dalam rangka mendukung pertahanan negara khususnya di ALKI II.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I. M., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan maritim di Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(2).
- Andriani, A. (2018). *Saya Indonesia, Negara Maritim Jati Diri Negaraku*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Ardyantara, D. M., Sukarna, K., Sadono, B., & Arifin, Z. (2020). Reposisi Kewenangan Antar Lembaga Negara Dalam Pengaturan Terkait Pertahanan Keamanan Kemaritiman Nasional. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 404-418.
- Harahap, M., Siregar, G., & Riza, F. V. (2020). Mapping The Potential Of Village Agricultural Social Economic Improvement Efforts In Lubuk Kertang Village Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat. *JASc (Journal of Agribusiness Sciences)*, 4(1), 8-14.
- Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 5(1).
- Kusuma, A. W., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Relevansi Strategi Pertahanan Laut Berdasarkan Doktrin Jalesveva Jayamahe Terhadap Globalisasi Dan Perkembangan Lingkungan Strategis. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(1).
- Nugroho, A. Y., Susilo, E., & Saputra, R. (2022). ANALISIS PEMBELAJARAN PERTEMPURAN LAUT ANTARA INGGRIS DENGAN JERMAN DI LAUT ATLANTIK UTARA 1941 BAGI TNI AL. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(1), 160-165.
- Nugroho, A., Sudarya, A., Widodo, P., & Pratiwi, U. N. (2022). Sinergi BNNP-TNI Kalimantan Barat Dalam Pencegahan Penyebaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Ancaman Nonmiliter Di Kalimantan Barat. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5), 1874-1882.
- Pangemanan, A. E. (2019). Kebijakan maritim dalam mewujudkan negara kesatuan republik indonesia sebagai poros maritim dunia. *Lex Et Societatis*, 7(12).
- Prasetya, T. (2022). TINJAUAN SIYASAH DAULIYAH TENTANG BELA NEGARA DI INDONESIA (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang

- Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara).
- Saputra, D. A. (2020). Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. *Lex Renaissance*, 5(4), 946-961.
- Siswanto, D. J., SE, M., & Tegor, S. E. (2021). *Manajemen Teritorial*. Deepublish.
- Sutisna, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan*. UNJ press.
- Wijaya, H. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yunanda, W. W., Nulhakim, F., & Soraya, N. A. (2022). Strategi Menjaga Kedaulatan Bangsa Demi Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Society 5.0 Dalam Perspektif Ilmu Pertahanan Dan Bela Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1195-1202.
- Zulham, M., & Saragih, H. M. (2021). STRATEGI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA DI TENGAH KEBIJAKAN JALUR SUTRA MARITIM CHINA. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(1), 49-61.
- Zulkarnain, I., & Runturambi, A. J. S. (2022). Sumber Daya Nasional Komponen Cadangan dalam Memperkuat Ketahanan Negara. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 9937-9949.